



UU CIPTA KERJA: INKONSTITUSIONAL & CACAT FORMIL

Pemerintah Tegaskan Tetap Berlaku 2 Tahun ke Depan, Nasib UMP Buram

Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan terkait gugatan UU Cipta Kerja yang dilakukan oleh serikat pekerja. MK menilai bahwa UU itu cacat formil dan inkonstitusional. DPR dan pemerintah diberi deadline waktu perbaikan 2 tahun ke depan. Bila tidak direvisi, maka UU lama dianggap berlaku kembali. Pemerintah melalui Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan, pihaknya akan mematuhi putusan MK. Selama masa perbaikan itu, UU Cipta Kerja dipastikan tetap berlaku. Menko Polhukam yang juga Mantan Ketua MK Mahfud Md juga ikut bersuara. Ditegaskan bila UU Ciptaker tidak bertentangan dengan UUD 1945, tapi MK menganggap pembentukan aturan itu kurang melibatkan stakeholder lain, sehingga perlu ada perbaikan. Buruh pun kecewa dan menilainya sebagai keputusan konyol. Harapan agar dicabut atau dibatalkan tidak terwujud. Walhasil, terkait upah minimum tahun 2021 ini, hingga 2023 hampir bisa dipastikan kenaikannya tipis. Kebahagiaan semu.

(Baca Hal 11)

REKAM JEJAK OMNIBUS LAW UU CIPTA KERJA

20 OKTOBER 2019
Dalam pidato pertamanya setelah dilantik sebagai Presiden RI untuk kedua kalinya, Joko Widodo menyinggung sebuah konsep hukum perundang-undangan yang disebut omnibus law.

JANUARI 2020
Ada dua omnibus law yang diajukan pemerintah, yaitu Cipta Kerja dan Perpajakan.

2 APRIL 2020
Surat presiden (surpres) tentang omnibus law RUU Cipta Kerja dibacakan dalam rapat paripurna DPR. Pembahasan draf RUU Cipta Kerja diserahkan kepada Badan Legislasi (Baleg).

24 APRIL 2020
Presiden Joko Widodo menunda pembahasan kluster ketenagakerjaan dalam RUU Cipta Kerja

14 APRIL 2020
Badan Legislasi DPR menggelar rapat kerja perdana bersama pemerintah membahas draf omnibus law RUU Cipta Kerja

20 APR-3 OKT 2020
RUU Cipta Kerja dibahas melalui 64 kali rapat

Sumber:
Berbagai Sumber Diolah
Desain:
Paulus/Lentera



3 OKTOBER 2020
Polemik soal RUU Cipta Kerja mengemuka kembali setelah Rapat Kerja Baleg DPR RI bersama pemerintah dan DPD RI pada Sabtu, (3/10/2020) malam, menyetujui Rancangan Undang-Undang (RUU) omnibus law Cipta Kerja dibawa ke Rapat Paripurna DPR. Hasil rapat itu membuat omnibus law RUU Cipta kerja tinggal selangkah lagi sebelum mendapat persetujuan menjadi Undang-Undang (UU).

5 OKTOBER 2020
DPR Mengesahkan omnibus law RUU Cipta Kerja menjadi undang-undang melalui rapat paripurna. UU Cipta Kerja terdiri atas 15 bab dan 174 pasal.

3 NOVEMBER 2021:
Buruh mengajukan gugatan ke MK. Dalam permohonannya, mereka mendalilkan pembentukan UU 11/2020 dengan metode omnibus law telah menimbulkan ketidakjelasan. Yakni apakah UU 11/2020 tersebut merupakan UU baru, UU perubahan ataukah UU pencabutan.

25 NOVEMBER 2021:
MK Mengembalikan sebagian putusan MK Terkait UU Cipta Kerja

1. Menyatakan pembentukan UU Nomor 11 Tahun 2021 tentang Cipta Kerja tidak mempunyai ketentuan hukum yang mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai tidak dilakukan perbaikan dalam waktu 2 tahun sejak putusan ini diucapkan.
2. Apabila dalam tenggang waktu 2 tahun pembentuk undang-undang tidak dapat menyelesaikan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, maka Undang-undang atau pasal-pasal atau materi muatan undang-undang yang telah dicabut atau diubah oleh UU Nomor 11/2020, harus dinyatakan berlaku kembali.
3. MK menyatakan UU Nomor 11 Tahun 2020 masih tetap berlaku sampai dengan dilakukan perbaikan pembentukan sesuai dengan tenggang waktu sebagaimana yang telah ditentukan dalam putusan ini. MK juga memerintahkan melarang menerbitkan pelaksana baru yang berkaitan dengan UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
4. Menyatakan untuk menanggulung segala tindakan atau kebijakan yang bersifat strategis dan berdampak luas, serta tidak dibenarkan pula menerbitkan pelaksana baru yang berkaitan dengan UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Catatan: 4 hakim konstitusi menyatakan *dissenting opinion* (Anwar Usman, Daniel, Manahan, dan Arief Hidayat)

GOVERNMENT TODAY

'Warning' WHO Meski Corona RI Turun 99,3% dari Puncak

Jakarta- Situasi pandemi corona di Indonesia terus melandai sejak puncak kasus pada gelombang kedua di 15 Juli lalu. Bahkan, Satgas Covid-19 mengklaim penurunan saat ini hampir 100% terjadi. Meski demikian, badan kesehatan dunia (WHO) memberikan warning ada peningkatan pasien hingga 10% di Ibu Kota Jakarta.

"Pencapaian Indonesia dapat dikatakan mampu bersaing. Negara kita berhasil menurunkan kasus 99,3% dari puncak lonjakan, mirip dengan Jepang dan dapat dipertahankan selama 130 hari," kata Koordinator Tim Pakar dan Juru Bicara Satgas Penanganan COVID-19, Prof. Wiku Adisasmito dalam konferensi pers virtual, Kamis (25/11).

Lebih lanjut dirinya mengatakan, kasus mingguan Indonesia kini ada di kisaran 2.500-an kasus. Angka ini bahkan lebih rendah dari sebelumnya. "Saat ini kasus mingguan di Indonesia 2.564. Jauh lebih sedikit dibanding titik terendah sebelum lonjakan yaitu 26.126 kasus," ujar Wiku.

Selain itu, pencapaian Indonesia ini terlihat jauh lebih baik dari dua negara lain yakni Filipina dan Iran yang juga tengah mengalami penurunan kasus. Kasus mingguan Filipina mencapai 8.342 dan Iran sebesar 36.367 kasus. "Jumlah ini juga lebih sedikit jika disandingkan dengan jumlah penduduk di mana Iran dan Filipina yang jumlah penduduknya lebih sedikit masih memiliki jumlah kasus lebih besar," pungkask Wiku.

Mobilitas Disoroti

Sebelumnya, WHO menyoroti jumlah pasien Covid-19 yang dirawat di DKI Jakarta. Hal ini dituangkan langsung dalam laporan mingguannya 'Covid-19 Situation Report 89' pekan ini. WHO memperingatkan bahwa ada peningkatan angka pasien Covid-19 di



(Ilustrasi) Kondisi RSUD Depok tampak lengang seiring penurunan pasien Covid-19. Foto.dok

rumah sakit wilayah Jakarta. Tercatat, ada kenaikan sebesar 10% bila dibandingkan dengan pekan sebelumnya.

"Pada 21 November, jumlah kasus Covid-19 yang dilaporkan dirawat di rumah sakit di DKI Jakarta adalah 200, sedikit meningkat dari 180 kasus satu minggu sebelumnya," tulis badan kesehatan PBB itu, dikutip Kamis (25/11).

Meski begitu, jumlah kasus yang dilaporkan dalam isolasi mandiri menurun dari 514 pada pekan sebelumnya menjadi hanya 296 kasus. Selain Jakarta, WHO juga memberikan peringatan bagi beberapa provinsi. Pasalnya provinsi-provinsi itu mengalami kenaikan mobilitas publik yang signifikan didorong oleh pelonggaran pembatasan kegiatan publik.

"Tren peningkatan mobilitas masyarakat terlihat di semua provinsi

di Jawa dan Bali, terutama di stasiun transit dan ritel dan rekreasi," tulis lembaga itu. "Peningkatan signifikan dalam mobilitas masyarakat di ritel dan rekreasi diamati di Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur dan Banten, di mana tingkat mobilitas pra-pandemi telah tercapai," tambah WHO.

Dengan kondisi seperti ini, organisasi yang berpusat di Jenewa, Swiss itu menghimbau agar Indonesia membuat perencanaan baru. Ini agar tidak terjadi ledakan kasus.

"Perumusan rencana konkrit diperlukan untuk mengantisipasi dan memitigasi kemungkinan dampak peningkatan mobilitas terhadap transmisi dan kapasitas sistem kesehatan di tingkat nasional dan daerah," imbau lembaga itu.

Kasus positif Corona di Indonesia bertambah 37, Kamis (25/11). Pasien yang dinyatakan sembuh dari Covid

hari ini bertambah 293 orang, sedangkan pasien yang meninggal dunia bertambah 16 orang.

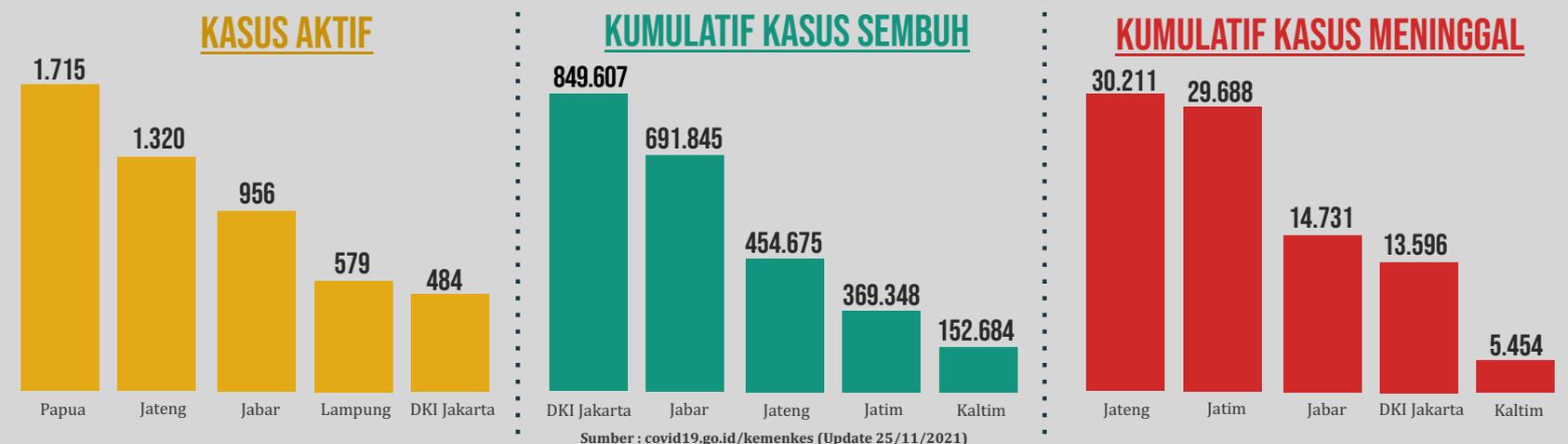
Dengan demikian, total kasus positif Covid di Indonesia sejak pertama kali dilaporkan pada Maret 2020 hingga saat ini berjumlah 4.254.815 kasus. Kasus sembuh jika ditotal menjadi 4.102.993, untuk kasus kematian Covid di Indonesia total berjumlah 143.782 kasus.

Kasus aktif Corona di RI juga naik 63 kasus. Total, ada 8.040 kasus aktif Corona di RI. Kasus aktif artinya pasien Corona belum dinyatakan sembuh atau meninggal. Dari data sebaran terlihat daerah yang kasus Coronanya paling banyak hari ini adalah DI Yogyakarta dengan 79 kasus, kedua adalah DKI Jakarta dan 54 kasus, disusul dengan Jawa Tengah 45 kasus. Kabar baiknya, ada 7 daerah yang melaporkan nihil kasus Corona hari ini. Daerah itu adalah Jambi, Sumatera Selatan, Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Barat, Maluku, dan Maluku Utara.

Terpisah, pakar memprediksi ledakan kasus corona di Eropa juga berpotensi terjadi di Indonesia jika tidak ada mitigasi yang dilakukan untuk mencegah penyebaran kasus. Epidemiolog dari Griffith University Australia Dicky Budiman mengingatkan agar seluruh pihak mewaspadai situasi pandemi Covid-19 pada awal tahun 2022. Dia menyebutkan secara tren gelombang COVID-19 dialami Eropa lebih dulu, kemudian Asia dan Amerika.

"Mungkin Indonesia bisa Februari akhir baru terasa dampaknya seperti apa yang terjadi di Eropa. Kuartal pertama tahun depan jadi masa yang rawan bagi Indonesia," kata Dicky dalam diskusi 'Menangkal Gelombang Ketiga COVID-19 di Indonesia'. (ashar,ant,ist/dya)

GRAFIK KASUS AKTIF, KASUS SEMBUH, KASUS MENINGGAL DI 5 PROVINSI TERTINGGI



Komisi II DPR Harap Pemerintah Pertimbangkan Usulan Revisi UU Pemilu

Jakarta - Wakil Ketua Komisi II DPR RI Luqman Hakim berharap pemerintah mempertimbangkan usulan DPD RI dan elemen masyarakat yang meminta revisi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

"Saya pimpinan Komisi II DPR RI berharap semoga sikap DPD RI dan berbagai elemen masyarakat yang menginginkan revisi UU Pemilu diperhatikan dan dipertimbangkan dengan sungguh-sungguh oleh Pemerintah," kata Luqman di Jakarta, Kamis (25/11).

Apabila pada akhirnya pemerintah bersedia membahas revisi UU Pemilu, kata dia, DPR melalui Komisi II dengan bahagia menyambutnya dan akan menindaklanjuti sesuai dengan prosedur pembahasan UU. Luqman menegaskan bahwa posisi Komisi II DPR RI siap setiap saat membahas revisi UU Pemilu. Namun, pemerintah yang tidak bersedia.

"Jadi, alangkah baiknya jika DPD RI dan berbagai elemen masyarakat yang menghendaki revisi UU Pemilu, berusaha sekuat tenaga untuk meyakinkan pihak pemerintah," ujarnya.

Komisi II DPR, lanjut dia, akan memperhatikan dan mempertimbangkan terkait dengan keputusan DPD RI yang meminta revisi UU Pemilu serta desakan elemen masyarakat yang disampaikan ke Komisi II DPR. Menurut dia, pemilu merupakan hajat besar rakyat, bangsa, dan negara sehingga berbagai masukan dan desakan agar aturan pemilu terus disempurnakan merupakan bukti kuatnya kesadaran bangsa Indonesia.

"Masukan dan desakan itu bukti kuatnya kesadaran bangsa Indonesia terhadap pentingnya pemilu sebagai sarana rakyat menggunakan kedaulatannya membentuk pemerintahan," katanya.

Hal senada diungkapkan Wakil



(Ilustrasi) Kotak suara Pemilu beberapa tahun terakhir berbahan baku kardus, sehingga lebih sederhana dan ringkas meski risiko rentan rusak akibat cuaca. Foto.Dok

Ketua Baleg Willy Aditya. "Ini yang enggak mau revisi undang-undang, pemerintah. Yaudah kalau bertepuk sebelah tangan, enggak bisa," ujar di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (25/11).

Willy menilai, usulan DPD RI sah saja sebagai aspirasi politik. Namun dia mengingatkan, dua RUU yang diusulkan DPD yaitu RUU Daerah Kepulauan dan UU BUMDES tidak jelas sampai hari ini juntrungannya. Apalagi kalau ingin menjadi usulan DPD perlu dibahas dalam rapat kerja dengan pemerintah, DPR dan DPD RI. "Jadi kita harus objektif kalau sebagai aspirasi manuver politik sah-sah saja. Tapi apakah itu akan masuk Prolegnas nah itu keputusan politik yang tidak hanya di DPD tapi ada dalam Raker Baleg

pemerintah, DPR dan DPD RI," ujarnya.

Idealnya Sebelum Juni

Bila memang pemerintah setuju, waktu untuk revisi adalah sebelum Juni 2022. "Menurut saya karena besar kemungkinan tahapan Pemilu 2024 akan dimulai sekitar Juni 2022," kata Wakil Ketua Komisi II DPR RI Luqman Hakim.

Ia menilai lebih baik jika sebelum tahapan Pemilu 2024 dimulai, aturan pemilu pada level undang-undang sudah final ditetapkan.

Hal itu, menurut dia, agar tidak terjadi kekacauan pelaksanaan tahapan-tahapan dan jadwal Pemilu 2024. Luqman mengatakan bahwa seluruh fraksi di Komisi II DPR RI sudah membahas serius dan mendalam berbagai

perbaikan aturan pemilu yang diperlukan, dari masa sidang tahun 2020 sampai Februari 2021.

"Pembahasan revisi UU Pemilu dihentikan Komisi II DPR RI setelah Presiden RI Sampaikan sikapnya bahwa Pemerintah tidak bersedia melanjutkan pembahasan revisi dengan berbagai pertimbangan. Sikap Presiden ini disampaikan kepada seluruh ketua umum partai koalisi pemerintah," ujarnya.

Dikatakan pula bahwa pembentukan suatu undang-undang tidak bisa dilakukan hanya oleh DPR saja, tetapi juga harus bersama pemerintah. Oleh karena itu, kata dia, berdasarkan sikap Presiden tersebut, akhirnya Komisi II mengambil keputusan dan menyampaikan kepada pimpinan DPR bahwa pembahasan revisi UU Pemilu tidak dilanjutkan pada saat itu.

"Keputusan DPD RI yang meminta agar dilakukan revisi UU Pemilu, tentu kami perhatikan dan pertimbangan. Selain itu, juga masukan dan desakan dari berbagai elemen masyarakat yang telah terlebih dahulu disampaikan, pasti menjadi catatan penting Komisi II DPR," katanya.

Untuk diketahui, Komite I DPD RI usulkan kembali revisi UU Pemilu masuk Prolegnas Prioritas tahun 2022. Keputusan tersebut diambil dalam rapat pleno dan akan disampaikan dalam Panmus dan Paripurna DPD RI pada bulan Desember. Revisi UU Pemilu sebelumnya telah dikeluarkan DPR RI dari Prolegnas Prioritas pada 9 Maret 2021.

Ketua Komite I DPD RI Fachrul Razi mengatakan, keputusan itu diambil berdasarkan tinjauan di daerah dan masukan stakeholders terkait pemilu. UU Pemilu saat ini dinilai banyak kelemahan dan perlu direvisi sebelum penyelenggaraan Pemilu 2024. (ashar, ant/dya)

PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Perkara Nomor 16/PUU-XIX/2021
terkait keserentakan Pemilu

POIN-POIN PUTUSAN:

- MK Perintahkan Pembentuk UU Untuk Segera Menindaklanjuti Putusan MK No. 55/PUU-XVIII/2019, Dengan Memperbaiki Kerangka Hukum Pemilu
- MK menyampaikan dalam pertimbangan, untuk mengurangi beban penyelenggara, salah satu jalannya adalah dengan memberi jeda waktu antara Pemilu DPRD dengan Pemilu Presiden, DPR, dan DPD

Sumber :
Berbagai Sumber Diolah

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT (DPR) SEDANG MENYUSUN DRAF REVISI UNDANG-UNDANG PEMILIHAN UMUM (UU PEMILU). SIKAP PARTAI POLITIK (PARPOL) TERBELAH

3 ISU KRUSIAL

- Ambang batas parlemen
- Ambang batas presiden
- Pelkada 2022 & 2023/serentak 2024

DRAF RUU PEMILU

- Ambang batas presiden: 20% >>
- Ambang batas parlemen: 5% >>
- Pilkada dinormalisasi tahun 2022 & 2023



Peringatan Hari Ikan Nasional 2021

DKP Jatim Gelar Seminar 'Go Budidaya! Dunia Dalam Genggaman'

Surabaya- Pemerintah menetapkan Hari Ikan Nasional (Harkannas) yang diperingati setiap tanggal 21 November. Langkah ini dilakukan sebagai upaya ketahanan pangan dan pemenuhan gizi nasional.

Guna memperingati Harkannas tahun 2021, Pemprov Jatim melalui Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Jatim pun menggelar serangkaian acara yang menarik dan juga menambah wawasan. Kegiatan itu digelar 23 -25 November 2021 yang sebagian besar acara diselenggarakan di Dyandra Convention Center, Surabaya.

Pada hari pertama, Selasa (23/11) Bidang Budidaya DKP Pemprov Jatim menggelar acara seminar dengan tema 'Go Budidaya! Dunia Dalam Genggaman' dengan mengungkap 2 topik pembahasan. Topik pertama, Bisnis Ikan Hias dan Pemberdayaan Ekonomi di Provinsi Jatim. Sementara, topik kedua membahas Mutiara dan Udang Kemilaukan Harapan Budidaya.

Acara yang dibuka oleh Kadis DKP Jatim, Dr. Ir. Dyah Wahyu Ermawati, MA dalam sambutannya mengatakan, Dinas Kelautan dan Perikanan Jatim mengajak seluruh masyarakat untuk memanfaatkan peluang usaha di bidang perikanan. Khususnya budidaya ikan yang mempunyai nilai ekonomis tinggi, seperti udang (Vaname dan Windu), ikan kerapu, ikan hias dan

tidak menutup kemungkinan kita juga bisa mengembangkan kerang mutiara.

Dinas Kelautan dan Perikanan Jatim telah memberikan dukungan yang cukup besar kepada semua lapisan masyarakat dan para stakeholder guna memfasilitasi dan memudahkan para pembudidaya dan pelaku usaha perikanan. Kemudahan itu diantaranya berupa bantuan hibah, pelayanan izin usaha, pelatihan dan bimbingan teknis budidaya dan lain-lain. Langkah ini bertujuan untuk membantu dan menstimulasi masyarakat guna melakukan usaha di bidang budidaya ikan.

Acara dihadiri pelaku usaha budidaya ikan dari beberapa kabupaten/kota Jatim, juga 6 universitas di Surabaya yang hadir secara offline dan online, juga diisi oleh beberapa nara sumber. Acara tersebut juga menghadirkan pameran ikan hias dan ikan budidaya lele-kolega keluarga.

Pencapaian DKP Jatim

Sebelumnya, Dyah menyampaikan, banyak pencapaian yang telah diraih oleh DKP Jatim tahun ini dengan mendapatkan Penghargaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dilingkungan Pemprov Jatim dengan predikat nilai AA (Sangat memuaskan).

DKP Jatim mendapatkan penghargaan peringkat 1 secara berturut-turut selama 4 tahun sejak Tahun 2018



Kadis DKP Jatim, Dr. Ir. Dyah Wahyu Ermawati, MA saat memberikan sambutan dalam rangkaian kegiatan peringatan Hari Ikan Nasional (Harkannas) yang digelar di Dyandra Convention Center, Surabaya, 23-25 November 2021. Foto: Dok.DKPJatim

sampai dengan sekarang.

Penghargaan SAKIP di-serahkan langsung oleh Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa kepada Kepala DKP Jatim, Dyah Wahyu Ermawati, dalam acara Penghargaan Pelaksanaan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP), Penandatanganan Perjanjian Kinerja (Perubahan) Tahun 2021, dan Pencanangan Perluasan Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM serta Peneguhan Komitmen Core Value ASN BerAKHLAK yang diselenggarakan di Hotel Bumi Surabaya pada tanggal 27 Oktober 2021.

Disusul dengan perolehan penghargaan oleh DKP Jatim pada acara Pameran dan Simposium Pelayanan



Pameran ikan hias dan ikan budidaya di acara peringatan Hari Ikan Nasional (Harkannas) yang digelar di Dyandra Convention Center, Surabaya, 23-25 November 2021. Foto: Dok.DKPJatim

Publik Provinsi Jawa Timur 2021 sebagai Juara 2 Stand Terinovatif diatas 10 meter persegi.

Dalam acara tersebut, DKP Jatim menampilkan showcase ikan Tuna dan lobster. Selain itu juga terdapat beberapa pelayanan seperti pelayanan cara budidaya ikan yang baik (CBIB), layanan Uji Kualitas Air dan Residu dan juga layanan perizinan. (adv)

740 Ribu Warga Indonesia Jadi Pengangguran Akibat Corona

Jakarta - Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat jumlah masyarakat yang terdampak pandemi Covid-19 mencapai 7,8 juta orang pada Agustus 2021. Dari jumlah tersebut, ada yang diberhentikan, dikurangi waktu kerjanya hingga dirumahkan sementara.

Direktur Statistik Kependudukan dan Ketenagakerjaan Nurma Midayanti menyebutkan, meski jumlahnya masih banyak, namun sudah lebih berkurang dibandingkan dengan awal terjadinya pandemi Covid-19. "Peningkatan kasus Covid-19 berpengaruh besar terhadap kondisi ketenagakerjaan kita. Ini tercermin dari tingkat pengangguran terbuka (TPT) yang sejatinya tren menurun tapi karena pandemi naik. Tapi Alhamdulillah di Agustus 2021 turun lagi TPT kita," ujarnya dalam workshop media, Kamis (25/11).

Dari data BPS, jumlah yang terdampak itu terdiri dari 740 ribu jiwa yang dipecah sehingga menjadi pengangguran. Sehingga jumlah pengangguran karena Covid-19 pada

periode Agustus 2020-Agustus 2021 turun dari 2,56 juta orang menjadi 1,82 juta orang.

Kemudian, 6 ribu orang yang bukan angkatan kerja yang juga terdampak Covid-19. Lalu, masyarakat tidak bekerja yang terdampak Covid-19 ada sebanyak 380 ribu orang.

Sementara itu yang paling banyak terdampak pandemi Covid-19 adalah masyarakat bekerja dan dikurangi jam kerjanya tercatat sebanyak 6,62 juta orang. Namun jumlah ini sudah lebih baik dibandingkan dengan Agustus 2020 yang sebanyak 24,03 juta orang menjadi 17,41 juta orang di Agustus 2021.

Di sisi lain, Deputi Bidang Statistik Sosial BPS Ateng Hartono menjelaskan yang paling terdampak pandemi Covid-19 jika dilihat dari karakteristiknya adalah generasi milenial dan Z. Di mana kedua generasi ini adalah usia kerja paling banyak.

"Ternyata yang paling terdampak Covid-19 adalah penduduk usia kerja,

usia 15 tahun ke atas. Itu kelompok yang terdampak besar, Terutama generasi Z," kata Ateng.

Dampak Upah Tinggi

Tak corona, Nurma Midayanti juga mengatakan upah minimum yang tinggi bisa memicu pengangguran yang lebih banyak. "Kalau upah lebih tinggi, itu akan mempengaruhi minat mereka ke angkatan kerja. Artinya, dari sisi pasokan akan meningkat. Tergantung dari demand-nya, lowongannya seberapa. Kalau ada peningkatan upah, pasti peminatnya banyak. Tetapi, bisa tertampung atau enggak," ujar nya.

Apalagi di kota-kota besar, lanjut dia, tentunya potensi pengangguran akan lebih banyak. Lantaran peminat untuk bekerja di ibu kota lebih besar karena mengincar upah minimum yang lebih tinggi. "Kalau tidak tertampung justru pengangguran akan semakin tinggi. Itu biasanya di kota-kota besar, justru pengangguran tinggi karena dari sisi demand,

penawaran kesempatan kerja atau lowongan kerja tidak dapat mengimbangi pasokan kerja," ucapnya. Dia menyebutkan, terdapat tiga faktor yang mempengaruhi pengangguran, yakni pasokan, permintaan, dan upah. (ashar,ant/dya)

TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA MENURUT TINGKAT PENDIDIKAN (AGT 21)

Universitas	5,98
Diploma I/II/III	5,87
SMK	11,13
SMA	9,09
SMP	6,45
SD ke Bawah	3,61

Sumber: Badan Pusat Pemeriksaan (BPS) (Persen)

Gelar Temu Bisnis dan Forum Investasi DKP Jatim Raih Minat Investor Hingga Rp 412,8 M

Surabaya - Dalam rangkaian peringatan Hari Ikan Nasional (Harkanans) ke-8 tahun 2021, Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Jawa Timur (Jatim) menggelar kegiatan Temu Bisnis dan Forum Investasi, Kamis (25/11) di Dyandra Convention Center Surabaya. Dalam acara tersebut, diketahui sedikitnya telah terjalin minat investasi senilai Rp 412,8 miliar.

Kegiatan Temu Bisnis dan Forum Investasi ini dihadiri oleh peserta secara luring maupun daring dengan jumlah peserta luring 100 orang dan daring berjumlah 150 peserta.

Dalam kegiatan tersebut hadir pula Indonesia Investment Promotion Center (IIPC) dari London, Tokyo, Taipei, Sydney, Singapore, Seoul, New York dan Abu Dhabi. Ada juga pihak Indonesia Trade Promotion Center (ITPC) dari Busan, Chennai, Hamburg, Mexico City dan Sao Paulo. Tak ketinggalan stakeholders, eksportir serta pelaku usaha kelautan dan perikanan.

Sedangkan peserta yang bergabung secara luring merupakan perwakilan dari 5 Bakorwil di Jawa Timur, Biro Perekonomian Sekretariat daerah, UPT Pelabuhan Perikanan Pantai, Instalasi Pelabuhan Perikanan Pantai hingga Perwakilan Dinas Perikanan Kabupaten/Kota Jawa Timur serta



Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Jatim, Dyah Wahyu Ermawati



dalam kegiatan Temu Bisnis dan Forum Investasi, Kamis (25/11/2021) di Dyandra Convention Center Surabaya. Foto-foto: dok.DKPJatim

calon investor. Kegiatan ini sekaligus memperingati Hari Jadi Provinsi Jawa Timur ke-76. Mengambil tema 'Menarik Minat Investasi Sektor Kelautan dan Perikanan di Jawa Timur' diharapkan kegiatan ini dapat menemukan investor dengan pelaku usaha kelautan dan perikanan.

"Kita ingin mengembangkan peluang bisnis sektor maritim ini tidak hanya dari produk perikanan, tetapi juga peluang bisnis lain seperti infrastruktur pelabuhan. Banyak sekali yang belum dimanfaatkan, lahan-lahan sekitar pelabuhan ikan di Jatim juga belum dimanfaatkan dengan optimal," jelas Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Jatim, Dyah Wahyu Ermawati.

Dalam kegiatan Temu Bisnis dan Forum Investasi ini, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Timur

berkesempatan menawarkan peluang investasi. Diantaranya pembangunan gedung processing, cold storage, pemanfaatan ICS (integrated cold storage), usaha penangkapan tuna longline, docking kapal, pemanfaatan lahan untuk fasilitas sarana dan prasarana di area pelabuhan perikanan, pembangunan pasar ikan sehat, penyediaan bunker / storage BBM, dan lain sebagainya.

Kegiatan Temu Bisnis dan Forum Investasi ini menghadirkan narasumber yang andal dibidangnya untuk mengupas peluang bisnis dan investasi di sektor kelautan dan perikanan. Ada paparan dari Direktur Perencanaan Ruang Laut (Ditjen PRL-KKP), Ir. Suharyanto, MSc., Koordinator Pe-metaan dan Peluang Investasi oleh Indra Nurcahyo Sjarif, S.Si, MSE, MA.

Sementara, narasumbernya antara lain pakar ekonomi dari Universitas Brawijaya, Ir. Agus Tumulyadi; Universitas Airlangga, Ir Amak M. Yoqoub, SE, MSM, PhD; dari IIPC Abu Dhabi, M. Ridwansyah Saidi Ungsi; Ketua HNSI Pasuruan sekaligus Praktisi Budidaya Udang Vanamei, H. Ilyas. Sementara Kepala Disperindag Provinsi Jawa Timur, Dr. Ir. Drajad Irawan, SE, MT, Kepala DPMPTSP Provinsi Jawa Timur, Ir. Aris Mukiyono, MT, MM menjadi keynote speaker.

Ke depan, lanjut Dyah, pemerintah ingin mendorong kawasan pelabuhan ikan tidak hanya menjadi tempat nelayan mencari ikan, dan hanya sebagai tempat jual beli ikan. Dyah mendorong kawasan ini bisa berkembang menjadi kawasan wisata yang potensial melalui berbagai investasi. (adv)

Lakukan Penelusuran, Dinsos Blitar Temukan ASN Ada di Daftar Bansos



Plt Kepala Dinsos Kabupaten Blitar, Tuti Komaryati. Foto: Dok

BLITAR - Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Blitar meleakakan penelusuran dan menemukan Aparatus Sipil Negara (ASN) di wilayah kerjanya ada yang masuk dalam daftar penerima bantuan sosial (bansos). Langkah ini menyusul temuan Kemensos RI yang mengatakan 31.000 lebih ASN menerima bantuan untuk warga terdampak Covid-19 itu.

Seperti disampaikan Plt Kepala Dinsos Kabupaten Blitar, Tuti Komaryati begitu ada kabar data temuan Kemensos RI 31.000 lebih

ASN menerima Bansos, Pemkab Blitar berinisiatif melakukan penelusuran dan cek data penerima Bansos. "Kami dari Dinsos langsung berkoordinasi dengan OPD terkait, untuk melakukan penelusuran dan cek data apakah ada ASN yang masuk daftar penerima Bansos," ujar Tuti, Kamis (25/11).

Lebih lanjut wanita yang juga menjabat Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesra Setda Pemkab Blitar ini menjelaskan, dalam proses penelusuran dan cek data pihaknya akan berkoordinasi dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dispendukcapil) dan Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Blitar. "Saat ini proses (penelusuran dan cek data), sedang berjalan. Karena jumlah ASN dan jumlah penerima Bansos di Kabupaten Blitar kan juga banyak, mencapai belasan bahkan puluhan ribu," jelasnya.

Ditandaskan Tuti, jika dalam penelusuran dan cek data penerima Bansos ditemukan ada ASN, akan diminta untuk mengembalikan dan

dicoret dari daftar. "Jadi kalau ditemukan ASN dalam data penerima Bansos, akan croscek ke rumah yang bersangkutan. Karena jelas aturannya ASN tidak boleh menerima Bansos, apa pun bentuknya baik barang (sembako) maupun uang," tandasnya.

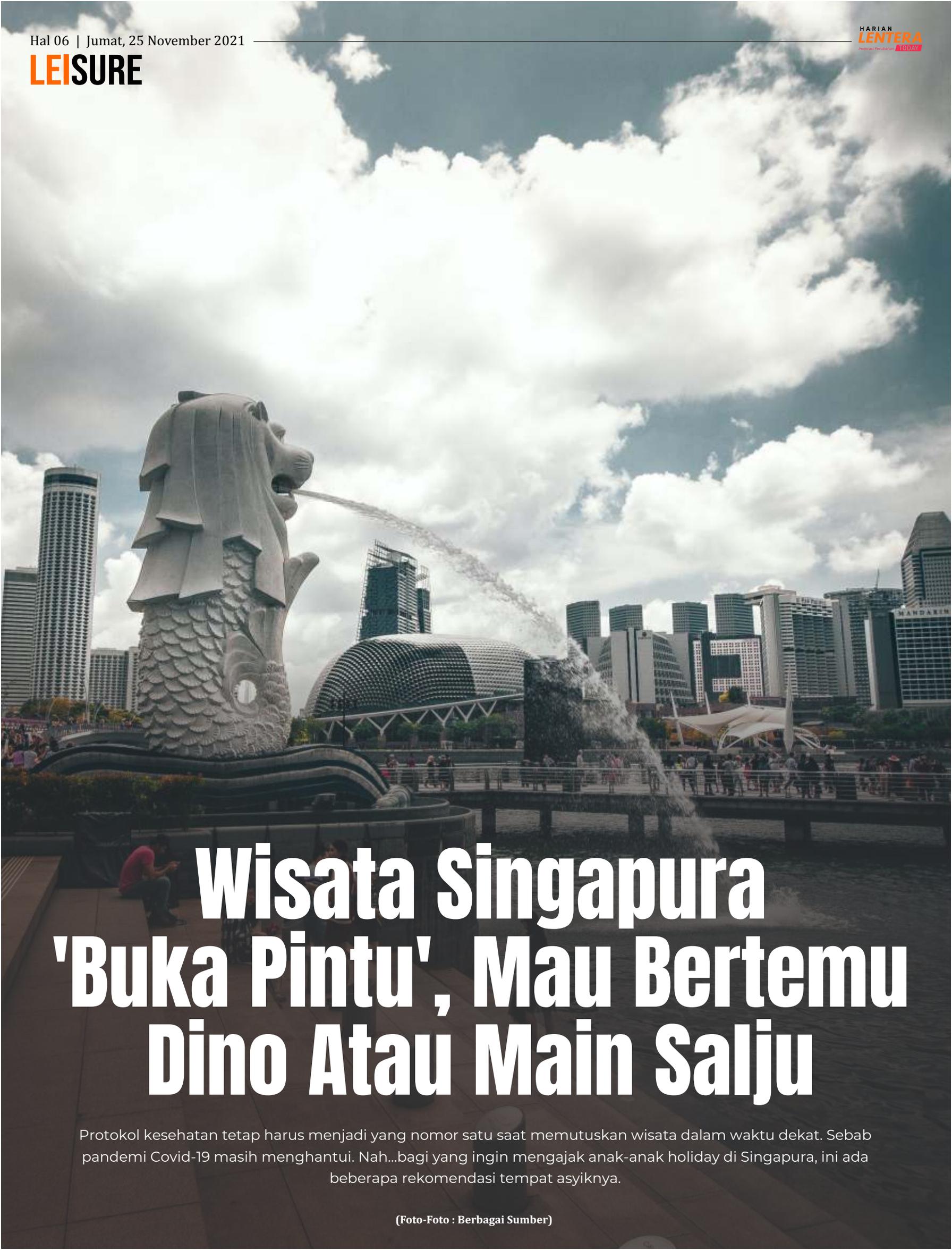
Disinggung adanya ASN yang masuk daftar penerima Bansosda berupa paket sembako, yang bersumber dari dana APBD saat awal pandemi Covid. Tuti mengakui memang ada, kesalahan itu menurutnya wajar dan manusiawi. Karena selain kondisi pandemi yang tinggi, sehingga semua harus bergerak cepat memberikan bantuan pada warga. Sehingga ada kesalahan data, ada ASN yang masuk daftar.

"Namun karena bantuan berupa barang (paket sembako), sehingga petugas yang mendistribusikan langsung mengetahui jika yang bersangkutan adalah ASN. Waktu itu, bantuan langsung dialihkan ke warga sekitarnya yang lebih membutuhkan, ada berita acaranya juga," ungkapnya.

Berapa jumlah ASN yang masuk dalam daftar penerima saat itu, Tuti mengaku tidak tahu pasti. Karena memang tidak di data dan tidak berfikir untuk mendatanya. Karena pada waktu itu, pendataan dan pendistribusian bantuan harus dilakukan secepatnya.

Tuti menjelaskan pengecekan dilakukan pada semua jenis Bansos regular, baik dari dana APBD daerah, provinsi maupun dari APBN pusat atau kementerian. "Semua data Bansos akan di cek, kalau menerima akan ditelusuri sejak kapan dan jumlah totalnya berapa. Maka lebih baik ASN yang merasa menerima Bansos, agar segera lapor," tegasnya.

Terkait sanksi, sampai saat ini belum ada aturan atau instruksi mengenai hal ini. Maka hasil dari penelusuran dan cek data ini, akan dilaporkan pada Bupati Blitar selaku Pembina Kepegawaian Daerah. "Tindaklanjutnya seperti apa, termasuk skema pengembaliannya bagaimana," kata Tuti. (arief sukaputra/dya)

A large photograph of the Merlion statue in Singapore, with the city skyline and the Esplanade - Theatres on the Bay in the background. The sky is filled with white clouds. The Merlion is spouting water into a pool.

Wisata Singapura 'Buka Pintu', Mau Bertemu Dino Atau Main Salju

Protokol kesehatan tetap harus menjadi yang nomor satu saat memutuskan wisata dalam waktu dekat. Sebab pandemi Covid-19 masih menghantui. Nah...bagi yang ingin mengajak anak-anak holiday di Singapura, ini ada beberapa rekomendasi tempat asyiknya.

Gerbang pariwisata Singapura sudah kembali dibuka untuk wisatawan asal Indonesia yang telah vaksin penuh. Sementara Negara Singa identik dengan wisata belanja dan foto, kota ini juga menyuguhkan beragam atraksi wisata untuk anak-anak.

Ada banyak tempat wisata untuk anak di Singapura, dengan beragam kegiatan mengenai seni, budaya, sains, sampai alam.



ArtScience Museum

Jangan lewatkan kunjungan ke ArtScience Museum di Marina Bay Sands. Museum yang memiliki bentuk lotus nan ikonik ini memiliki 21 galeri dengan luas 6.000 meter persegi.

Future World adalah pameran tetap di museum ini, hasil kerja sama dengan teamLab asal Tokyo, sebuah perkumpulan seni antardisiplin yang terkenal. Pameran ini akan mengajak pengunjung bertualang dalam dunia baru yang terbagi menjadi tema; City in A Garden, Sanctuary, Park, dan Space.

ArtScience Museum sengaja membuat pameran interaktif bagi pengunjung. Anak-anak dapat menyentuh bahan pameran, bermain seluncuran yang juga bagian dari pameran. Museum ini juga mendedikasikan setiap Jumat sebagai Jumat Keluarga. Setiap pembelian tiket dewasa gratis tiket anak-anak maksimal empat anak di bawah usia 12 tahun.



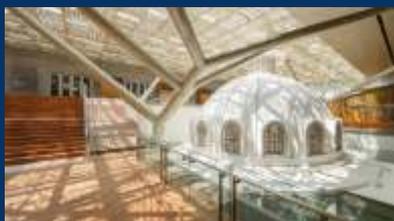
Singapore Zoo

Singapore Zoo terkenal sebagai kebun binatang ramah keluarga dengan banyak pilihan aktivitas yang dirancang khusus untuk anak-anak. Anak-anak bisa ikut Wildlife Tour, sebuah tur yang menjelajah kebun binatang dengan kendaraan khusus yang terbuka dan pemandu, memberi makan binatang, dan bertanya pada para pawang fauna.

Anak-anak bisa bertemu dan berinteraksi dengan binatang lucu seperti Asian Small-Clawed Otters (berang-berang kecil), Capybara (kapybara), dan Great White Pelican (pelican putih besar). Di sini juga ada area kemah khusus anak serta kegiatan team bonding yang membuat anak belajar kebersamaan dan semakin akrab dengan alam.

National Gallery Singapore

National Gallery Singapore punya satu arena khusus untuk aktivitas anak-anak bernama Keppel Centre for Art Education. Tempat ini menjadi wadah



untuk mengembangkan imajinasi, kreativitas, dan eksplorasi anak melalui seni.

Ada enam area khusus aktivitas anak, dibagi berdasarkan kegiatan. Art Playscape, area anak bisa membuat karya seni dari cat. Ink Studio, tempat anak-anak melihat cara kerja robot melukis.

Studio Workshop, tempat keluarga beraktivitas seni bersama seperti membuat aneka kriya. Project Gallery, tempat anak berimajinasi dengan pahatan Dayung Sampan raksasa. Sculpture Studio, tempat anak belajar membuat pahatan dengan material dan alat yang sudah disediakan.

Terakhir ada Story Corner, tempat anak-anak mendengarkan, menari, dan bernyanyi dengan cerita serta karya seni yang sudah dibuat di galeri. Keppel Centre for Art Education mendapatkan penghargaan Children in Museums Award pada 2018 dari European Museum Academy and Hands On! International Association of Children in Museums.



Science Centre Singapore

Belajar sains jadi lebih seru di Science Centre Singapore! Ada 24 pameran berbeda yang sesuai untuk anak usia dini dan lanjut belajar di sini. Bahkan, orang tua juga bisa ikut belajar bersama anak di sini.

Topik setiap pameran sangat beragam, dari belajar tentang kinetik atau gerak dan energi di Kinetic Garden, metamorfosis kupu-kupu di Butterflies Up-Close, refleksi di Mirror Maze, sampai belajar tentang kotoran atau sekresi tubuh di Know Your Poo.

Science Centre Singapore merupakan lokasi yang kerap digunakan oleh sekolah di Singapura untuk karya wisata. Perjalanan belajar bisa ditutup dengan hal menyenangkan seperti bermain di Kidsstop atau lapangan bermain interaktif, bermain salju di area Snow City Singapore, dan bermain jadi ninja dalam Laser Maze Challenge.

Forest Adventure

Anak termasuk tipe yang aktif dan pemberani? Cobalah atraksi seru di Forest Adventure. Aktivitas di sini dapat melatih mental, koordinasi gerak tubuh, dan manajemen waktu.

Jangan khawatir, sebab kegiatan di sini sangat aman karena dibagi berdasarkan kategori, diberi peralatan keamanan yang maksimal, dan didampingi pemandu berpengalaman. Anak usia lima sampai sembilan



tahun bisa mengikuti kegiatan Kids Course, yang terbagi menjadi 22 lintasan tantangan dan dua zip line.

Sementara anak usia di atas sembilan tahun dapat menggunakan jalur Junior Course dengan 26 lintasan tantangan dan dua zip line, termasuk yang melintasi air.



Lee Kong Chian Natural History Museum dan Jurassic Mile

Tak ada salahnya untuk membawa anak Anda ke tempat yang terkenal akan fosil dinosaurus yakni di Lee Kong Chian Natural History Museum. Lee Kong Chian Natural History Museum merupakan museum biodiversitas terkemuka di Asia Tenggara. Ada 10 ribu koleksi spesimen yang terbagi dalam 15 zona menarik.

Tiga fosil dinosaurus sauropod menjadi daya tarik di sini. Kondisi fosil ini 80 persen utuh dan membuat pengunjung yang melihatnya langsung terkesima.

Selain melihat fosil, anak-anak pencinta dinosaurus juga bisa melihat pahatan dinosaurus yang menyerupai aslinya di Jurassic Mile. Lokasinya berada di kawasan Bandara Changi. Lebih dari 20 dinosaurus dengan sembilan spesies berbeda dipamerkan di sini. Area ini sangat cocok dijelajahi sambil jogging atau bersepeda. Bintangnya? Siapa lagi kalau bukan Tyrannosaurus Rex, si karnivora yang terkenal. Kabar gembiranya, atraksi ini tidak dipungut biaya alias gratis.

The Art Ground

The Artground in Goodman Arts Centre memfasilitasi kegiatan seni yang bervariasi untuk mengembangkan



kreativitas dan motorik anak. Di sini pameran seni bahkan menjadi tempat bermain anak, seperti dijadikan seluncuran atau area panjat.

Setiap akhir pekan The Artground juga menghadirkan program aktivitas untuk anak-anak, misalnya seni pertunjukan drama, sesi mendongeng, berkebun, dan membuat kerajinan tangan. The Artground juga memiliki program Artist Incubation, tempat para seniman lokal terhubung dengan anak-anak, guru, dan orang tua untuk membuat pengalaman seni yang bermakna.



Jacob Ballas Children's Garden

Jacob Ballas Children's Garden adalah taman pertama di Asia yang didedikasikan untuk anak-anak dan dapat dikunjungi gratis, tanpa biaya tiket masuk. Taman ini berlokasi di Singapore Botanic Garden yang masuk dalam Situs Warisan Dunia UNESCO.

Anak-anak dapat bertualang dan belajar mengenai tanaman dan hubungan timbal balik antara makhluk hidup dan alam (ekologi) di taman. Ada beberapa area menyenangkan untuk anak, seperti jembatan gantung dan area bermain alam, jalur trekking di sepanjang sungai, rumah pohon, dan area kebun untuk belajar bercocok tanam.

Saat anak lapar dan haus, jangan khawatir. Ada beberapa restoran dan kafe cantik bertema alam untuk tempat anak istirahat setelah beraktivitas di bawah sinar matahari. Mau pilih yang mana? atau boleh lah dikunjungi semua! (berbagai sumber/dya)



Singapura

Ilfil Gegara Ketiak Bau, Ini Cara Mudah Menghilangkannya

Ketiak yang mengeluarkan bau tak sedap akan menurunkan rasa percaya diri. Berikut cara menghilangkan bau ketiak yang bisa Anda coba. Bau tak sedap itu umumnya muncul saat tubuh mengeluarkan keringat akibat bakteri yang menempel di permukaan kulit.

Mengutip Healthline, saat tubuh berkeringat, bakteri memecah protein dalam keringat yang menghasilkan asam dan bau. Bau itu yang kerap mengganggu penciuman banyak orang. Ada

beberapa bagian tubuh yang rentan keluar bau tak sedap. Ketiak adalah salah satunya.

Kondisi lembap di ketiak menjadi tempat terbaik bagi bakteri untuk berkembang biak. Namun, Anda tak perlu khawatir. Ada beberapa cara untuk menghilangkan bau tak sedap tersebut. Cara-cara tersebut umumnya meliputi menerapkan kebiasaan hidup bersih dan perawatan tubuh yang tepat.

Rajin mandi

Anda disarankan untuk mandi dua kali dalam sehari. Cara ini dapat mengurangi pertumbuhan bakteri pada kulit ketiak. Mengutip WebMD, Anda juga disarankan untuk menggunakan sabun antibakteri atau anti-septik. Gosok kulit dengan sabun, terutama di area-area berkeringat seperti ketiak.

Cukur bulu ketiak

Mencukur atau mencabut bulu ketiak juga bisa jadi salah satu cara menghilangkan bau ketiak. Cara ini ditemukan dapat mengurangi bau badan secara signifikan. Mengutip NCBI, penelitian tahun 2016 menemukan, bau badan tak kembali muncul usai bulu ketiak dicukur dan dibilas dengan sabun.

Gunakan deodoran

Deodoran dapat menghentikan pertumbuhan bakteri sebagai sumber bau tak sedap. Aplikasikan deodoran secara teratur setiap hari saat tubuh bersih dan kering. Gunakan deodoran setidaknya dua kali sehari.

Deodoran membuat bakteri tak nyaman tinggal di ketiak. Kandungan antiperspiran yang ada di dalamnya juga dapat memblokir kelenjar keringat untuk memproduksi lebih banyak keringat.

Pilih pakaian yang tidak terlalu ketat

Hati-hati memilih pakaian, apalagi bagi Anda yang sibuk dan aktif berkegiatan. Untuk menekan produksi keringat, hindari pakaian yang terlalu ketat. Pilih pakaian longgar yang terbuat dari bahan seperti katun, linen, sutera, atau wol. Bahan-bahan ini memungkinkan kulit untuk bernapas dan membuat keringat lebih cepat menguap.

Sebaliknya, hindari pakaian berbahan polyester, nilon, atau rayon. Kain berserat sintesis cenderung memerangkap keringat sehingga memicu bau tak sedap.

Perhatikan asupan makanan

Tak cuma faktor kebersihan dan pilihan pakaian, asupan makanan juga berkontribusi terhadap timbulnya bau tak sedap. Hindari bahan makanan seperti bawang merah, bawang putih, bawang bombai, paprika, daging merah, kopi, teh, dan minuman beralkohol. Makanan-makanan tersebut bisa memicu bau tak sedap dari tubuh. Sebagai gantinya, konsumsi makanan tinggi zinc dan magnesium seperti kerang, tahum yogurt, acar, dan buah-buahan. Lakukan cara menghilangkan bau ketiak di atas agar percaya diri semakin meningkat. (berbagai sumber/dya)



(Ilustrasi) Cara Mudah Menghilangkannya Ketiak bau
Foto : Pixx by Panther

PAKAI DEODORAN, TELITI KANDUNGAN BERBAHAYANYA

1. Aluminium

Riset dari University of Reading, Inggris, mendapati aluminium yang terkandung dalam deodoran dapat mengakibatkan ketidakstabilan gen pada jaringan payudara. Ini akan mendorong pertumbuhan tumor atau sel kanker. "Lebih dari 50 persen kanker payudara dimulai di kuadran luar atas payudara lokal ke daerah ketiak," kata peneliti Philippa Darbre.

2. Paraben

Sebagian produk perawatan tubuh menggunakan paraben. Penelitian menemukan beberapa jenis paraben

bisa mengganggu produksi dan pengaturan estrogen juga hormon lain. "Ada jaringan yang sensitif estrogen pada payudara, sehingga ada kekhawatiran jika Anda mengaplikasikan paraben dekat dengan jaringan ini setiap hari, akan memicu sel kanker," kata Patisaul.

3. Ftalat (phthalates)

Para peneliti memperingatkan bahan lain yang harus diwaspadai yakni ftalat atau phthalates. "Ftalat adalah bahan kimia berbahaya yang ditambahkan ke produk plastik yang digunakan selama proses produksi

makanan dan dapat mengakibatkan masalah kesehatan yang serius," tulis Patisaul dalam makalah penelitiannya.

Menurut Patisaul, terdapat cukup bukti paparan ftalat tidak baik untuk perkembangan otak. Sedangkan pada deodoran, zat kimia ini bisa merusak fungsi androgen yang memproduksi dan mengatur hormon testosteron.

4. Triclosan

Bau badan disebabkan bakteri sehingga produsen deodoran atau antiperspiran menambahkan zat yang bisa membantu mengatasi kuman

termasuk triclosan. Sebenarnya penggunaan triclosan tidak menimbulkan bahaya berarti. Akan tetapi pada beberapa studi terhadap hewan, triclosan berhubungan dengan aktivitas hormon yang tidak biasa.

5. Wewangian (fragrance)

Salah satu hal yang membuat produk menarik perhatian konsumen adalah aroma atau wanginya. Harapannya, aroma ini akan menutup bau ketiak. Namun, penelitian menunjukkan wewangian ini bisa jadi campuran ftalat atau substansi lain yang bisa memicu alergi. (cnn/dya)

Meski Ragu, Mobil Listrik Apple Santer Dikabarkan Mengaspal 2025

Apple terus merampungkan pengembangan mobil listrik yang tersimpan teknologi self-driving. Jika tidak ada halangan mobil cerdas dari Apple akan meluncur pada 2025. Menurut, Apple menargetkan untuk memulai memproduksi kendaraan 'pintar' itu mulai 2024.

Perusahaan teknologi itu dikabarkan mulai mengembangkan mobil otomatisasi mulai 2014, yang tidak akan memiliki lingkaran kemudi dan pedal karena dirancang untuk mampu bergerak tanpa kendali manusia mengutip Reuters.

The Wall Street Journal, sempat memberitakan upaya pengembangan mobil listrik Apple dikenal sebagai Project Titan. Ini merupakan proyek ambisius Apple untuk menggarangi sektor otomotif di masa depan yang diprediksi akan diramaikan mobil-mobil otonom berteknologi canggih.

Fungsinya sendiri dijelaskan Apple untuk mengurangi kesalahan pengemudi dalam perjalanan. Analisis Dan Ives dari Wedbush menjelaskan Apple masih kurang percaya diri untuk dapat meluncurkan mobilnya pada 2025 atau ragu berkisar antara 60 hingga 65 persen.

Laporan Bloomberg mengatakan sejumlah pengembang yang terlibat dalam proyek tersebut skeptis terkait sistem self-driving, chip prosesor, dan sensor-sensornya. Namun, Apple menolak mengomentari laporan tersebut. Saat ini, permintaan pasar untuk kendaraan listrik mengalami kenaikan karena negara-negara dan pelanggan menjadi lebih peduli terhadap lingkungan.

Hal tersebut mendorong nilai pasar perusahaan seperti Tesla dan Rivian menjadi jauh di atas produsen mobil konvensional selama beberapa dekade.

Untuk produksinya, Apple dilaporkan semakin dekat untuk bekerjasama dengan perusahaan otomotif patungan antara LG dengan Magna bernama LG Magna e-

(Ilustrasi) Mobil Listrik Apple, Dikabarkan akan Mengaspal 2025
Foto: Istimewa



Powertrain. Ujung dari kerja sama ini akan membuat LG dan Magna International memproduksi Apple Car.

Apple diperkirakan akan memperkenalkan kendaraan bertenaga listrik paling cepat tahun 2025. Melansir 9to5mac, segala urusan kemitraan LG dan Magna diprediksi selesai akhir tahun ini. Sedangkan Apple bakal menjadi klien utama.

Di awal tahun, ada banyak laporan yang menyebutkan Apple sedang menajajaki kesepakatan dengan Kia dan Hyundai, dengan nilai kerjasama sekitar US\$4 miliar. Namun, kedua perusahaan otomotif mengkonfirmasi bahwa mereka tidak lagi berdiskusi dengan Apple sejak Februari 2021.

Putusnya komunikasi kerja sama itu diduga terkait dengan keinginan mobil Apple menjadi milik Apple, dan mitra Apple hanya akan bertindak

sebagai penghubung dalam rantai pasokan seperti hubungan Foxconn dengan iPhone. Hyundai dan Kia diduga tak mau direduksi menjadi rantai pasok produsen belaka.

Melansir Korea Times, volume produksi mobil Apple dikabarkan tidak akan besar. Sebab, Apple berniat menggunakan EV generasi pertamanya sebagai kesempatan untuk mengevaluasi daya jual mereka.

"Karena afiliasi LG Group termasuk LG Display, LG Chem, LG Energy Solution, dan LG Innotek sudah termasuk dalam rantai pasokan suku cadang Apple, Apple tidak perlu khawatir tentang masalah rantai pasokan. Afiliasi LG ini memenuhi syarat untuk menjamin hasil produksi dan pengiriman suku cadang yang lebih cepat yang diperlukan untuk Apple EV," kata sumber.

Setelah kesepakatan dibuat, kedua pihak akan bersama-sama menetapkan detail yang relevan untuk produksi Apple EV, yang prototipenya akan keluar sekitar awal 2024. LG Magna e-Powertrain bernilai US\$1 miliar dan akan ditugaskan untuk memproduksi e-motor, inverter dan pengisi daya. LG akan memiliki 51 persen perusahaan baru dan Magna, 49 persen.

LG sebelumnya telah memasok motor, paket baterai, dan komponen lainnya untuk Bolt EV General Motors dan ke Tesla. Magna sudah membuat elektronik otomotif untuk perusahaan. Magna, yang berkantor pusat di luar Toronto, sebelumnya mengatakan akan membuat kendaraan di sebuah pabrik di Amerika Utara jika dikontrak untuk melakukannya. (reuters/dya)



LISTSTYLE

Diduga Sebarkan Virus Herpes, Awat Saat Coba Lipstik Tester

Kehadiran tester membantu calon pembeli untuk meyakinkan diri apakah suatu produk make up cocok untuk kondisi kulitnya. Termasuk lipstik. Namun hati-hati saat memakainya, sebab diduga ada lipstick tester memiliki andil menyebarkan virus herpes.

Dua tahun lalu sempat mencuat kabar seorang perempuan asal California, AS, Elena Davoyan yang menggugat label Sephora. Pada 2017, dia didiagnosa terkena herpes oral setelah kunjungannya ke Sephora. Di sana dia mencoba lipstick tester.

Penulis Ninit Yunita pun sempat mengangkat isu ini lagi. Beberapa waktu lalu ia mengadakan voting di Twitter tentang apakah mereka memiliki kebiasaan untuk mencoba lipstick tester langsung di bibir.

Dalam tulisannya di laman The Conversation, dosen Ilmu Biomedis di Aston University, Amreen Bashir menjelaskan herpes bisa menimbulkan lepuhan pada bibir dan sekitar mulut. Kondisi ini bisa bertahan hingga 10 hari. Make up termasuk lipstick yang menyentuh area ini, bisa menjadi media penularan virus pada orang lain.

"Beruntung virus penyebab herpes itu rapuh dan biasanya hanya bisa bertahan di luar tubuh selama 10 detik. Namun itu bisa bertahan lebih lama di kondisi lingkungan hangat dan lembap seperti di keringat. Itu juga bisa bertahan sekitar 1-2 jam di plastik atau air jadi, ada banyak cara virus bisa menyebar," tulis Bashir di The Conversation.

Lipstik bukan satu-satunya media penularan herpes. Penyakit ini bisa timbul karena kontak kulit dengan kulit semisal berciuman. Karena merupakan salah satu penyakit menular seksual, herpes bisa menular lewat hubungan seks.

Bashir menambahkan herpes pun bisa menular dari orang yang terinfeksi lewat handuk, cangkir, alat makan yang digunakan bersama-sama.

Kasus yang baru terdengar mungkin karena lipstick tester, tetapi dia mengingatkan bahwa make up lain pun berpotensi menularkan herpes seperti maskara dan eyeliner. Studi menunjukkan sebanyak 43 persen eyeliner dan maskara mengandung



(Ilustrasi) Awat Saat Coba Lipstik Tester
Foto : Kaboompics/Pexels

kontaminasi bakteri atau virus.

Saat digunakan, timbul gejala infeksi seperti mata berubah warna menjadi merah muda, kemerahan bahkan lebih parah kebutaan. "Semua cerita menakutkan ini memberikan pesan, jauhkan diri dari berbagi produk make up dengan teman apalagi di toko kosmetik. Anda tak tahu infeksi apa yang kemungkinan dibawa orang-orang di kulit mereka," kata dia. (reutres/dya)

TIPS AMAN MENCoba TESTER MAKE UP TANPA PERLU TAKUT TERKENA SERANGAN PENYAKIT

1. Perhatikan baik-baik

Perhatikan baik-baik saat hendak mengaplikasikan tester make up dan juga setelah memakainya. Lihat tempat penyimpanan, kuas make up, detail produk, dan bagian permukaan make up. Tester make up yang kotor berarti tak layak dicoba karena mengandung banyak bakteri.

2. Hindari makeup bertekstur lembap

Hindari make up yang bertekstur lembap dikarenakan bakteri sangat suka ditempat yang lembap. Makeup yang bertekstur lembap di antaranya antara lain lipstick, lip balm, dan stik highlighter. Tester maskara juga berbahaya untuk dicoba karena langsung diterapkan dari mata ke mata pelanggan. Concealer juga sebaiknya tak dicoba karena dapat berisiko menimbulkan jerawat. Produk make up lain seperti blush on dan eye shadow aman untuk dicoba, walaupun tetap perlu hati-hati.

3. Hindari mencoba produk di wajah

Alih-alih mencoba langsung ke wajah, cobalah untuk mencoba tester make up di bagian tangan atau pergelangan tangan. Wajah merupakan area sensitif yang dapat langsung bereaksi terhadap bakteri. Mencoba lipstick misalnya dapat dilakukan di telapak tangan. "Coba di telapak tangan, jangan di punggung tangan karena telapak tangan lebih menyerupai warna bibir

daripada bagian belakang tangan Anda," kata ahli kimia kosmetik Ginger King, dikutip dari Allure.

4. Bersihkan produk sebelum dan setelah mencoba

Jangan lupa untuk selalu membersihkan tester makeup sebelum dan setelah mencoba tester makeup. Selalu bersihkan permukaan tester makeup dengan tisu dan sikat pembersih. Gunakan cairan alkohol untuk membersihkan tester make up karena dapat membunuh bakteri. Jangan ragu untuk meminta alkohol pada petugas gerai make up untuk membersihkan tester dan bagian tubuh yang diaplikasikan tester make up.

5. Minta tester baru

Jika tester tak bisa untuk dibersihkan, tak perlu takut untuk meminta tester baru kepada petugas make up. Toko yang baik akan memberikan tester yang baru. Tester make up yang baru berarti masih aman dan juga serta bersih dari pemakaian yang kita tidak ketahui kebersihannya. (berbagai sumber/dya)



UU Cipta Kerja: Inkonstitusional(dari hal 1)

Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan pembentukan Omnibus Law UU Cipta Kerja cacat formil. Oleh karenanya, MK memerintahkan adanya perbaikan dalam jangka waktu 2 tahun ke depan.

Dalam putusannya, MK menyinggung sejumlah hal terkait pembentukan UU Cipta Kerja ini. Sebab, dinilai tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana UU 12/2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Yakni terkait 'asas kejelasan rumusan' yang menghendaki agar setiap peraturan perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan peraturan perundang-undangan, sistematika, pilihan kata atau istilah, serta bahasa hukum yang jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya.

"Namun, ternyata tidak digunakan sebagaimana mestinya sehingga menimbulkan ketidakjelasan cara atau metode yang digunakan oleh UU 11/2020," bunyi pertimbangan MK dikutip dari situs resmi Mahkamah Konstitusi, Kamis (25/11).

Gugatan ini diajukan oleh Hakiimi Irawan Bangkid Pamungkas, Ali Sujito, Muhtar Said, S.H., M.H., Migrant CARE (yang diwakili oleh Ketua dan Sekretaris), Badan Koordinasi Kerapatan Adat Nagari Sumatera Barat (yang diwakili oleh Ketua Umum dan Sekretaris Umum), dan Mahkamah Adat Alam Minangkabau yang diwakili oleh Ketua (Imam) Mahkamah.

Dalam permohonannya, mereka mendalilkan pembentukan UU 11/2020 dengan metode omnibus law telah menimbulkan ketidakjelasan. Yakni apakah UU 11/2020 tersebut merupakan UU baru, UU perubahan ataukah UU pencabutan.

MK menyatakan bahwa pembentukan UU harus menggunakan cara dan metode yang pasti, baku, dan standar yang sudah ditentukan. Baik yang terkait dengan penyusunan naskah akademik maupun rancangan undang-undang, sebagaimana hal tersebut dimaktubkan dalam Pasal 44 dan Pasal 64 UU 12/2011.

Tujuannya ialah untuk menciptakan tertib dalam pembentukan peraturan perundang-undangan sehingga produk hukum yang nantinya akan dibentuk menjadi mudah untuk dipahami dan dilaksanakan. Salah satunya mengenai standar baku perumusan judul.

UU Ciptaker berkaitan dengan 78 UU, di mana 77 UU merupakan perubahan undang-undang dan 1 UU berupa pencabutan undang-undang. "Dalam UU 11/2020 ketentuan mengenai pencabutan UU secara utuh tidak dirumuskan sesuai dengan sistematika yang telah ditentukan dalam Lampiran II UU 12/2011 tetapi diletakkan pada bagian pasal-pasal dari ketentuan UU yang mengalami perubahan," bunyi pertimbangan hakim.

"Dengan demikian, apabila UU 11/2020 dimaksudkan sebagai pembentukan UU baru maka format dan sistematika pembentukannya harus disesuaikan dengan format pembentukan

UU baru. Apabila dimaksudkan sebagai perubahan UU semestinya format perubahan tersebut mengikuti format yang telah ditentukan sebagai pedoman baku atau standar dalam mengubah peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaktubkan dalam Lampiran II UU 12/2011," masih bunyi pertimbangan hakim.

Tetap Berlaku Sambil Diperbaiki

Menteri Koordinator bidang Perencanaan Airlangga Hartarto menegaskan, selama masa perbaikan itu, UU Cipta Kerja tetap berlaku. "Putusan MK dibacakan agar pemerintah tak terbitkan aturan baru yang bersifat strategis sampai perbaikan atas pembentukan UU Cipta Kerja. Dengan demikian, peraturan perundang-undangan yang berlaku UU Cipta Kerja tetap berlaku," tegas Airlangga dalam paparannya.

Terpisah, Menko Polhukam Mahfud Md mengatakan UU tersebut dinilai MK bertentangan dengan UUD 1945 secara bersyarat. "MK tidak menilai UU Ciptaker bertentangan dengan UUD 1945, tapi menilai bertentangan dengan UUD 1945 secara bersyarat. Beda artinya," katanya. Baca juga:

Dia menjelaskan yang menjadi persoalan atas dikabulkannya secara bersyarat pengujian formil UU Ciptaker adalah prosedur pembentukan UU tersebut. Mahfud menyebut MK menganggap pembentukan UU Ciptaker kurang melibatkan stakeholder lain sehingga perlu ada perbaikan.

"Yang jadi soal bukan isinya, tapi prosedurnya dianggap kurang melibatkan lebih banyak stakeholders. Jadi UU itu diminta agar diperbaiki lagi

prosedurnya," ujarnya.

Dituding Putusan Konyol

Presiden Asosiasi Serikat Pekerja (Aspek) Indonesia Mirah Sumirat menilai putusan MK terakut UU Ciptaker konyol. "Disampaikan oleh MK bahwasanya undang-undang tersebut tetap berlaku sambil dikasih waktu 2 tahun untuk memperbaiki. Itu kan konyol bener, menurut saya," katanya.

Ia mengira ketika MK menyebutkan UU Cipta Kerja sebagai inkonstitusional, maka aturan tersebut akan dibatalkan dan kembali berlaku ke aturan-aturan sebelumnya.

Putusan berkata lain, hakim MK justru memberi ruang kepada pemerintah dan DPR untuk merevisi undang-undang omnibus law tersebut. Pasalnya secara prosedural pembentukan UU tersebut tidak sesuai perundang-undangan.

Namun demikian, Mirah menyatakan pihaknya akan tetap melancarkan aksi mogok nasional pada tanggal 6 hingga 8 Desember 2021. Ia pun mengaku akan terus berkoordinasi dengan seluruh lintas federasi buruh yang ada. Ia pun mengingatkan kepada pemerintah, apabila mogok nasional berlanjut negara akan menanggung kerugian hingga triliunan rupiah.

"Jangankan 3 hari, waktu itu sehari saja negara rugi puluhan triliun. Dulu 2012 pernah juga kita kan tutup tol saat pemerintahan Pak SBY, rugi puluhan triliun negara," ujarnya. Mirah menyerukan kepada buruh untuk memamatkan produksi dan turun ke lapangan untuk melakukan aksi mogok nasional. (ashar,ant,cnn/dya)

TEMUAN MK DALAM UU CIPTA KERJA

Standar Baku Pembentukan UU

MK menyatakan bahwa pembentukan UU harus menggunakan cara dan metode yang pasti, baku, dan standar yang sudah ditentukan. Baik yang terkait dengan penyusunan naskah akademik maupun rancangan undang-undang, sebagaimana hal tersebut dimaktubkan dalam Pasal 44 dan Pasal 64 UU 12/2011.

Perbedaan Naskah Sebelum dan Setelah Diundangkan

MK menemukan adanya perbedaan antara naskah Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja yang telah disetujui bersama DPR dan Presiden sebelum disahkan dan diundangkan menjadi Undang-Undang dengan naskah yang telah disahkan menjadi Undang-Undang.

Kesalahan Pengutipan

MK juga menemukan adanya kesalahan pengutipan dalam UU Cipta Kerja. Yakni dalam rujukan pasal yaitu Pasal 6 UU 11/2020 yang menyatakan "Peningkatan

ekosistem investasi dan kegiatan berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a meliputi...". Sementara, materi muatan Pasal 5 menyatakan "Ruang lingkup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 meliputi bidang hukum yang diatur dalam undang-undang terkait".

Minim Partisipasi Publik

MK menemukan fakta pula bahwa pembentuk undang-undang tidak memberikan ruang partisipasi kepada masyarakat secara maksimal terkait pembentukan UU Cipta Kerja. Meski telah dilaksanakan berbagai pertemuan dengan berbagai kelompok masyarakat.

FAKTOR PENETAPAN

1. Kondisi ekonomi dan ketenagakerja dengan variabel:

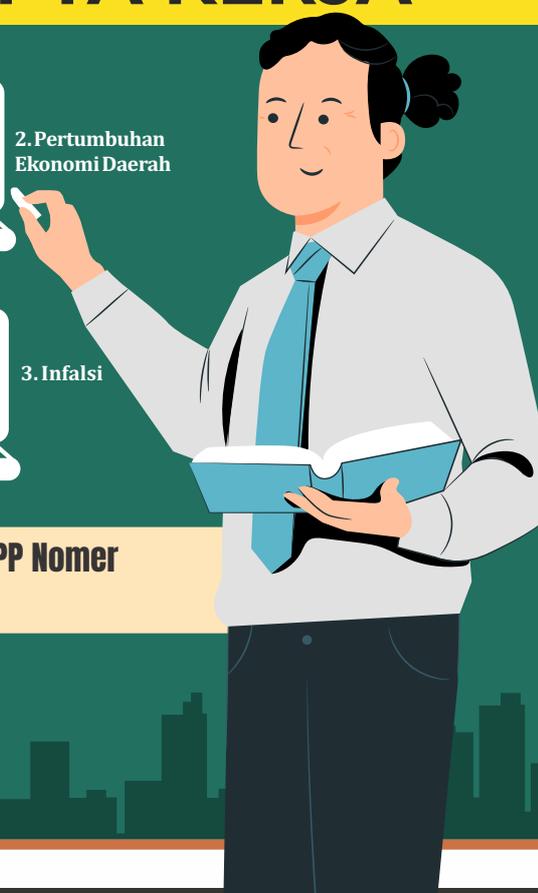


2. Pertumbuhan Ekonomi Daerah



3. Infalsi

Berdasarkan PP Nomer 36 Tahun 2021



NOW!!!Drs. H. ACHMAD ISKANDAR, M.Si
WAKIL KETUA DPRD PROVINSI JAWA TIMURHj. ANIK MASLACHAH, S.Pd., M.Si
WAKIL KETUA DPRD PROVINSI JAWA TIMURKUSNADI, SH., M.Hum
KETUA DPRD PROVINSI JAWA TIMURH. ANWAR SADAD, M.Ag
WAKIL KETUA DPRD PROVINSI JAWA TIMURSAHAT TUA P. SIMANJUNTAK, SH
WAKIL KETUA DPRD PROVINSI JAWA TIMUR

RAPERDA PEMBERDAYAAN ORMAS WUJUD PENEGAKAN SALAH SATU PILAR DEMOKRASI

Ketua Komisi A DPRD Jatim, Isti Hari Subagio
Foto: Istimewa

SURABAYA – Keberadaan Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) di Jawa Timur akan semakin menunjukkan perannya sebagai salah satu pilar utama negara demokrasi. Hal ini seiring dengan rampungnya pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pemberdayaan Organisasi Kemasyarakatan.

Ketua Komisi A DPRD Jatim, Isti Hari Subagio, mengatakan Ormas memiliki peranan yang sangat penting, karena ciri utama negara demokrasi adalah adanya kebebasan (freedom/liberty). Ormas merupakan sarana dan perwujudan dari asas kebebasan tersebut. "Untuk itu, maka demokrasi dan Ormas ibarat dua sisi mata uang yang tidak dapat dipisahkan satu dengan lainnya," katanya saat rapat Paripurna DPRD Jatim, Kamis (25/11/2021).

Lebih lanjut, Isti menandakan berdasarkan berbagai pembahasan, pertimbangan, dan juga saran dari Gubernur Jawa Timur, maka rumusan materi muatan rancangan Perda tentang Pemberdayaan Ormas terdiri dari 8 bab dan 28 pasal.

"Perumusan materi muatan Raperda yang lebih sederhana tersebut telah disesuaikan dengan pendapat Gubernur serta masukan dan saran dari berbagai pemangku kepentingan seperti Ormas, Pemerintah Kabupaten/Kota dan Perangkat Daerah Provinsi

Jawa Timur," sambungnya.

Politisi Partai Golkar ini menandakan bahwa, dalam Raperda tersebut ada tiga bentuk yang cukup penting terkait dengan pemberdayaan. Ketiga bentuk tersebut adalah fasilitasi kebijakan, penguatan kapasitas kelembagaan, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia.

"Pemberdayaan Ormas dalam bentuk fasilitasi kebijakan tersebut adalah berupa peraturan perundang-undangan yang mendukung pemberdayaan Ormas. Oleh karena itu, dalam rangka melakukan pemberdayaan Ormas melalui fasilitasi kebijakan itulah diusulkan Raperda ini," tandas Purnawirawan TNI AD ini.

Politisi kelahiran Nganjuk ini menandakan bahwa dalam Raperda ini juga ada norma-norma yang menjadi substansi. Diantaranya adalah norma mengenai Kewenangan Pemerintah Provinsi dalam Pemberdayaan Organisasi Kemasyarakatan. Kewenangan tersebut meliputi; menyusun kebijakan Pemberdayaan Ormas; menyusun perencanaan Pemberdayaan Ormas; melakukan kerjasama dalam rangka Pemberdayaan Ormas; melakukan pengawasan eksternal terhadap Ormas di Provinsi; dan kewenangan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kemudian ada norma yang mengatur mengenai Perencanaan Pemberdayaan Ormas yang merupakan garis-garis besar dalam penyelenggaraan pemberdayaan Ormas. Norma selanjutnya adalah yang mengatur mengenai Pelaksanaan Pemberdayaan Ormas yang merupakan substansi utama dalam Raperda tersebut.

Perda ini juga memuat fasilitasi kebijakan dan penguatan kelembagaan. Kemudian memuat juga penguatan kualitas sumber daya manusia Ormas. Bahkan juga mengatur ketentuan mengenai kriteria Ormas yang dapat menerima Pemberdayaan Ormas.

Kemudian juga ada norma mengenai partisipasi masyarakat. Dalam hal ini, nantinya masyarakat dapat berpartisipasi dalam Pemberdayaan Ormas di Daerah. Partisipasi masyarakat tersebut dapat dilaksanakan dalam bentuk keterlibatan secara aktif dalam kegiatan Pemberdayaan Ormas, pengawasan Ormas di Daerah dan atau membantu dan mendukung kegiatan Ormas yang diselenggarakan di wilayah setempat.

Dalam melaksanakan pengawasan, Gubernur membentuk tim terpadu pengawasan Ormas yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur. Sedangkan, pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemberdayaan Ormas oleh masyarakat dilakukan dalam bentuk Pengaduan secara tertulis kepada Gubernur.

Selain beberapa norma atau ketentuan sebagaimana telah dijelaskan di atas, juga diatur ketentuan mengenai kewajiban Pemerintah Provinsi dengan penanggung jawab Bakesbangpol untuk menyusun dan menetapkan Peraturan Gubernur sebagai pelaksanaan dari Raperda ini paling lambat 3 bulan sejak Raperda ini diundangkan.

Secara ringkas keseluruhan materi yang termuat dalam Raperda tersebut meliputi ketentuan umum; kewenangan Pemprov; Perencanaan Pemberdayaan ormas; pelaksanaan pemberdayaan Ormas; Partisipasi masyarakat; pembinaan dan pengawasan; pem-

biayaan; dan ketentuan penutup.

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Jatim, Anwar Sadad memandaskan bahwa dengan selesainya pembahasan Raperda tersebut maka akan disampaikan ke Menteri Dalam Negeri untuk dilakukan evaluasi. "Mudah-mudahan setelah itu bisa berjalan lancar untuk kemudian disahkan sebagai Perda," katanya.

Sementara itu, Wakil Gubernur Jawa Timur, Emil Elestianto Dardak mengharapkan bila dalam proses pembahasan tentang Raperda ini berjalan lancar. Dia menandakan Raperda tersebut bisa menjadi sebuah wujud sinergi.

"Karena kita harus akui sebagai negara demokratis dan sebagaimana disampaikan oleh Mayjen purnawirawan Isti Subagio tadi yaitu bahwa memang mereka menjadi bagian dari penguatan Civil Society atau masyarakat sipil untuk bisa menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara yang demokratis," tandasnya

Sebelumnya, Wagub juga mengatakan bahwa jumlah Ormas di Jatim terbilang besar. Karenanya, Pemprov memahami jika Raperda inisiatif DPRD Jatim ini merupakan langkah strategis untuk menjadikan potensi besar itu menjadi berkualitas dan berjalan beriringan dengan Pemda dalam pembangunan masyarakat Jatim.

"Terhadap materi yang diatur dalam Raperda ini, pada dasarnya kami dapat memahami dan mengapresiasi," ungkap mantan Bupati Trenggalekitu.

Dia juga melihat bahwa penyusunan materi yang sederhana dan secara teknis diamanatkan dalam peraturan Gubernur, membuat rancangan peraturan daerah ini tidak rumit. Dengan demikian memudahkan masyarakat untuk memahami isi Perda itu.

Dia menandakan, yang lebih penting adalah Raperda ini benar-benar diimplementasikan dalam upaya pemberdayaan ormas serta betul-betul mampu menciptakan Ormas yang berkualitas. "Dan mempunyai daya dukung positif bagi pembangunan bangsa dan negara pada umumnya serta pembangunan daerah pada khususnya," ungkapnya. (Lutfi/ADV)